



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MENJADI TUAN DI NEGERI SENDIRI: PERSPEKTIF POLITIK

Dr. H. Marzuki Alie
KETUA DPR-RI

Disampaikan Pada Acara Konvensi Kampus VII dan Temu Tahunan XIII Forum Rektor Indonesia
Palembang, 14-15 Januari 2011

1

PENDAHULUAN

Bung Karno, sebagai proklamator dan bapak bangsa, pernah mengingatkan bahwa hakikat kemerdekaan Indonesia itu ada tiga aspek (TRISAKTI) yang tidak boleh dipisahkan, yaitu:

- [1] dalam politik kita, berdaulat,**
- [2] dalam ekonomi, kita berdiri di atas kaki sendiri, dan**
- [3] dalam kebudayaan, kita berkepribadian.**

Artinya, **manakala terdapat kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka INDONESIA akan selalu menjadi bangsa besar yang diperhitungkan dunia.**

2

Bung Hatta pada tahun 1928 mengatakan “**Lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain.**”

Artinya, yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah **kedaulatan bangsa** atau **kedaulatan politik di negeri sendiri, berupa kebebasan untuk menentukan nasib bangsa sendiri.**

Dengan demikian **MENJADI TUAN DI NEGERI SENDIRI** dari perspektif politik terkait dengan cita-cita para pendiri bangsa untuk merdeka, merebut dan mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia.

3

PERSPEKTIF HISTORIS

- Dari perspektif historis cita-cita kedaulatan politik itu telah demikian mengemuka pada era Kebangkitan Nasional (1908), yang diekspresikan dengan hadirnya berbagai gerakan politik menentang penjajahan dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia.
- Tonggak lain yang penting dalam sejarah pergerakan nasional untuk menggapai cita-cita politik kemerdekaan bangsa adalah :
 - SUMPAAH PEMUDA 1928.
 - Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
- **Menjadi tuan di negeri sendiri** dalam perspektif politik, selaras dengan bangkit dan menguatnya **nasionalisme** (semangat kebangsaan) INDONESIA, sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat.

4

- Nasionalisme Indonesia tumbuh di kalangan anak bangsa, dari segenap spektrum masyarakat untuk mewujudkan suatu Negara Bangsa (Nation-state) yang plural secara primordial (suku, agama, ras, golongan, adat-istiadat dan sebagainya), tetapi bersatu dalam kesamaan cita-cita politik.
- Karenanya, secara **genuine dan otentik**, cita-cita politik kebangsaan kita tumbuh dari anak-anak bangsa (yang menolak imperialisme dan kolonialisme), diperjuangkan oleh anak-anak bangsa (dengan segenap tenaga, pikiran, bahkan pengorbanan fisik), dan untuk masa depan anak-anak bangsa kita (bagaimana mereka tumbuh menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur).

5

DEMOKRASI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM SISTEM POLITIK

- MENJADI TUAN DI NEGERI SENDIRI dalam perspektif politik (kedaulatan politik) kita, selaras dengan cita-cita THE FOUNDING FATHERS yang memilih bentuk negara REPUBLIK. Hakikat Republik (Res Publica) adalah pemerintahan yang selalu dikawal oleh rakyat berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi).
- Kedaulatan politik kita mewujud ke dalam Indonesia adalah negara republik yang demokratis.

6

- Secara substansial demokrasi mengedepankan beberapa prinsip dasar :
 - Kesederajatan (egalitarianisme)
 - Penghargaan hak asasi manusia
 - Partisipasi publik
 - Keadilan dan kesejahteraan
 - Pemilu berkala secara demokratis
 - Checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh **elected politician**
 - Praktik **Trias Politika** (pemisahan/pembagian kekuasaan) untuk mencegah otoritarianisme
 - Pers yang bebas dan bertanggungjawab
 - Dan sebagainya

7

- Kedaulatan politik (yang tercermin dalam prinsip-prinsip dasar demokrasi) tersebut, secara prosedural diimplementasikan ke dalam bangunan sistem politik yang didesain dan disepakati oleh para elite penentu kebijakan.
- Pada awal kemerdekaan, walaupun UUD 1945 cenderung pada sistem presidensial, pilihan sistem politik kita adalah SISTEM PARLEMENTER.
 - Wapres Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat X bulan Oktober 1945 yang membuka peluang berdirinya partai-partai politik dalam masyarakat.
 - PM Sjahrir memfungsikan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai semacam DPR/MPR sementara dengan pola parlementer (akomodasi partai-partai politik yang sudah ada).

8

- Sistem ini bertahan, walaupun perjuangan kemerdekaan mengalami fase REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (1949), Era kembali ke negara kesatuan (17/8/1950) dengan UUDS 1950, Era Demokrasi Parlementer pasca-Pemilu 1955, dan berakhir ketika Presiden Soekarno mengeluarkan DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 –walaupun tidak mengakhiri sama sekali praktik parlementer.

9

- Pada masa Orde Baru, sistem politik presidensial dikoreksi dan diganti dengan sistem pemerintahan presidensial, yang ditandai dengan penyederhanaan sistem kepartaian (dari multipartai menjadi hanya ada tiga kontestan pemilu, yakni PPP, GOLKAR, PDI).
- Paradigma politik Orde Baru adalah anti-multipartai, mengutamakan stabilitas politik dan keamanan (dengan mendukung GOLKAR sebagai penopang politiknya), serta orientasi pertumbuhan ekonomi.
- Kritik yang mengemuka atas pilihan sistem politik Orde Baru adalah :
 - Tidak memprioritaskan demokrasi, tetapi mempraktikkan sistem politik yang cenderung menopang rezim semi-otoritarian.
 - Tidak menjamin kebebasan politik dan partisipasi politik publik secara optimal.
 - Memupuk sentralisme kekuasaan (state-centris) dan memperlemah basis-basis kekuatan kemandirian masyarakat (civil society).

10

- Pada era reformasi, sistem politik dikembalikan pada paradigma demokrasi. Secara paradigmatis, hal ini sudah sesuai dengan cita-cita awal pendiri bangsa. Namun, kembali pula kita dihadapkan pada pilihan-pilihan sistem politik yang hendak dikembangkan (demokrasi prosedural).
- Catatan kita selama 12 tahun Reformasi, dari perspektif politik ditandai oleh Amendemen UUD 1945, yang mendasari adanya sistem politik dan ketatanegaraan yang antara lain ditandai oleh:
 - Perubahan desain sistem perwakilan (legislatif, dengan adanya DPD) dan yudikatif (dengan adanya MK)
 - Adanya sistem multipartai dan sistem pemilu yang sejak 1999 hingga 2009 berubah-ubah.

11

- Capaian politik kita sepanjang era reformasi ditandai oleh hal-hal yang positif dan negatif.
 - Positif (dengan diakomodasinya praktik politik yang demokratis dan partisipatif)
 - Negatif (belum sepenuhnya mampu mewujudkan stabilitas politik yang berkualitas, karena tak lepas dari fenomena konflik-konflik politik terutama di daerah-daerah)

12

SISTEM POLITIK YANG EFEKTIF

- Karenanya, dalam konteks MENJADI TUAN DI NEGERI SENDIRI dalam perspektif politik, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan guna :
 - Menciptakan sistem demokrasi politik yang andal dan lebih menjadi perwujudan stabilitas politik yang berkualitas –sehingga menjamin situasi yang kondusif bagi berjalannya pembangunan di segala bidang.
 - Memperkuat tradisi (budaya) politik yang demokratis, dalam arti konsisten dalam mengedepankan prinsip-prinsip dasar demokrasi –baik di tingkat elite politik maupun rakyat/masyarakat.
 - Mendorong lembaga-lembaga politik (baik partai-partai politik maupun lembaga-lembaga kenegaraan) tumbuh secara mandiri dan kokoh, sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi positifnya secara optimal.
 - Memperkokoh jatidiri dan kedaulatan bangsa secara luas, dari intervensi asing, karena haluan politik kita adalah politik kebangsaan (yang menekankan optimalisasi pencapaian kepentingan nasional di segala bidang).

13

PENUTUP

- MENJADI TUAN DI NEGERI SENDIRI dalam perspektif politik tidak dapat dilepaskan dari perspektif-perspektif lain, baik ekonomi, hukum, sosial-budaya, hankam dan sebagainya.
- MENJADI TUAN DI NEGERI SENDIRI dalam perspektif politik dapat terwujud manakala paradigma demokrasi bangsa, dapat diderivasikan ke dalam suatu sistem politik yang efektif dalam menciptakan stabilitas politik, memperkokoh integrasi dan kedaulatan bangsa.
- MENJADI TUAN DI NEGERI SENDIRI dalam perspektif politik berarti proses politik ditandai oleh kedewasaan politik dan kebijakan-kebijakan politik kita semakin produktif dalam mendorong segala bidang bergerak maju, guna mewujudkan cita-cita nasional.

14